BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 308/IX/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 48/II/TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati Tana Toraja yang terarah, terpadu, terprogram dan sesuai prioritas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 48/II/Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 158/V/Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tana Toraja 48/II/Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan rancangan peraturan bupati yang belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, sehingga Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 48/II/Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 perlu diubah kedua kalinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 48/II/Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 48/II/Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 48/II/Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sul-sel di Makassar;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Tempat;
4. Direktur RSUD Lakipadada di Makale;
5. Para Kepala Bagian Lingkup Setda di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 300/IX/TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 48 /II/TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	INSTANSI TERKAIT	KET
			BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, bagi hasil pajak dan retribusi dari APBD Kabupaten Tana Toraja kepada lembang Tahun Anggaran 2026	Mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
2	Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah lembang dan BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, THR, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2026	Mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2026	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
3	Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026	Mengatur terkait Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD	√	-	Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2023	BPKPD	
4	RKPD Tahun 2027	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	√	-	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
5	Perubahan RKPD Tahun 2026	a. Pendahuluan b. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Trw. II c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RKPD f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	-	√	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
6	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029	Mengatur mengenai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029	√	-	Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	DP3AP2KB	
7	Penanggulangan Tuberculosis	Pengaturan mengenai penanggulangan tuberculosis di fasilitas layanan kesehatan	√	-	Perturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis	Dinas Kesehatan	

8	Transaksi Non Tunai Lembang	Pengaturan mengenai Transaksi Non Tunai Lembang	√	-	Instruksi Bupati Tana Toraja Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	
9	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengaturan mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik	√	-	Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PUTR	
10	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026	Pengaturan terkait Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD, Bag. Organisasi , BKPSDM	
11	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Mengatur Terkait Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
12	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Mengatur Terkait Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
13	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027	Mengatur Terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
14	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	√	-	Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Keakyaan Penyelenggaran Negara	BKPSDM, Inspektorat Daerah	
15	Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaaan, pelapoiran, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas poengelolaan keuangan daerah	√	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah, BPKPD	

		- Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian			- Peraturan Daerah Kabupaten tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah		
16	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2027	√	-	- Pemendagri No 90 Tahun 2019 - Pemenkeu No. 83/ PMK 02/2022 - Pemendagri No. 77 Tahun 2020 - Pemendagri No. 84 Tahun 2022	BPKPD	
17	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Labkesda	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Labkesda	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala	
18	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Puskesmas	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Puskesmas	√	-	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala	
19	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Persampahan	Pembentukan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Persampahan	√	-	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023	DLH dan Bagian Ortala	
20	Perubahan Atas Perbup Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Upt Rsud Lakipadada Pada Dinas Kesehatan	Pengaturan mengenai Perubahan Atas Perbup Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Upt Rsud Lakipadada Pada Dinas Kesehatan	-	√	Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	RSUD Lakipadada dan Bagian Ortala	
21	Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Lakip	Pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Lakipadada	√	-	Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Lakipadada	
22	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	
23	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030	Pengaturan mengenai Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030	Dinas Pariwisata	

24	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek	Pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang serta mendorong pembangunan berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait	
25	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Makale Selatan	Pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Makale Selatan sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang serta mendorong pembangunan berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait	
26	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bittuang	Pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bittuang sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang serta mendorong pembangunan berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	Dinas PUTR dan perangkat daerah terkait	
27	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	Pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	√	-	Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	
28	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja	Pengaturan mengenai Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja dan pemetaan daerah rawan bencana	√	-	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	BPBD dan perangkat daerah terkait	
29	Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal tata kelola persandian, manajemen SDM persandian, hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengelolaan informasi berkalsifikasi, operasional persandian dan monev persandian	√	-	Peraturan BSSN nomor 10 Tahun 2019 tenatang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Inforrmasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Diskominfosan	
30	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Pedoman atau Kebijakanpemerintah daerah dalam rangka meningkatkan keamanan informasi pada instansi pemerintah maupun sektor publik dan swasta	√	-	Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfosan	
31	Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Kebijakan Pemda dalam penyelenggaraan statistik sektoral terkaitprinsip dasar, standar, prosedur dan kriteria	√	-	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	Diskominfosan	
32	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pangan	√	-	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Ortala	
33	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
34	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Utara	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Utara	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	

35	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Selatan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Selatan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
36	Peta Batas Lembang Lea Kecamatan Makale	Peta Batas Lembang Lea Kecamatan Makale	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
37	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale Selatan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale Selatan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
38	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mengkendek	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mengkendek	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
39	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Gandangbatu Sillanan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Gandangbatu Sillanan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
40	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
41	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kurra	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kurra	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
42	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
43	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Malimbong Balepe'	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Malimbong Balepe'	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
44	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Saluputti	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Saluputti	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
45	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
46	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Masanda	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Masanda	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
47	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
48	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bonggakaradeng	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bonggakaradeng	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
49	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	

50	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mappak	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mappak	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
51	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	Perubahan atas Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan TA 2026	-	√	- Perpres 72 Tahun 2025 - Pemenkeu No. 83/ PMK 02/2022 - Pemendagri No. 77 Tahun 2020 - Pemendagri No. 84 Tahun 2022	BPKPD	
52	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadad	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadad	√	-	-PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Permendagri 79 Tahun 2019	RSUD Lakipadada	
53	Pengelolaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Pengelolaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	√	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum	
54	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepla Lembang.	Penyesuaian beberapa kentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa	√	-	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 ,Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepla Lembang.	DPML	
55	Perubahan Tarif Retribusi	Penyesuaian dan perubahan tarif retribusi	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	BPKPD	
56	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	BPKPD, dan Bagian Ortala	
57	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	BPKPD, dan Bagian Ortala	
58	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Bapelitbangda, dan Bagian Ortala	

59	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	BPBD, dan Bagian Ortala	
60	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol, dan Bagian Ortala	
61	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga , dan Bagian Ortala	
62	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga , dan Bagian Ortala	
63	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan , dan Bagian Ortala	
64	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kesehatan	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kesehatan	√	-	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala	
65	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bagian Ortala	
66	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup	Pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup	√	-	Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, dan Bagian Ortala	

67	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	- Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	
68	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	√	Penyesuaian PSAP 18 dan PSAP	BPKPD	
69	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	
70	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Toraja 2025-2029	Pengaturan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tana Toraja 2025-2029	√	-	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	BPBD dan perangkat daerah terkait	

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG